



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menduduki posisi penyumbang terbesar bagi kas negara, karena besarnya peran penerimaan pajak bagi kas negara memungkinkan segala kegiatan pemerintahan dapat berjalan terus. Diperlukannya manajemen pajak sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia, dimana jika ada beban pajak yang harus dibayar maka sebisa mungkin wajib pajak tersebut melakukan berbagai upaya agak beban pajak tersebut sekecil mungkin untuk dibayar.

Isu *Corporate Governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei *Pricewater House Coopers* investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *Governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (*Forum For Corporate Government In Indonesia*, 2008). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk komite nasional kebijakan *Governance* dan mengeluarkan pedoman *Good Corporate Governance* yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi dewan komisaris, dewan direksi, dan rapat umum pemegang saham, Wirawan, (2012) di dalam Sindi, (2014).Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Khoirunisa, (2013)

NO	KODE PERUSAHAAN	INDEP		
		2014	2015	2016
1	INTP	0,43	0,43	0,43
2	SMBR	0,60	0,60	1,00
3	IPOL	0,60	0,60	0,60
4	SMGR	0,57	0,57	0,57
5	JKSW	0,67	1,67	0,40
6	JPRS	2,50	0,50	1,67
7	KRAS	0,33	0,33	0,60
8	LION	0,33	0,33	0,33
9	NIKL	0,83	0,83	0,33
10	TBSM	0,40	0,40	0,40
11	BRPT	0,33	0,33	0,33
12	INCI	0,33	0,33	0,33
13	INAF	0,33	0,33	0,33
14	KAEF	0,33	0,33	0,33
15	ARNA	0,50	0,50	0,50
16	TOTO	0,67	0,67	0,67
17	BUDI	0,33	0,33	0,33
18	DPNS	0,33	0,33	0,33
19	EKAD	0,50	0,50	0,50
20	AUTO	0,67	0,67	0,67
21	INDS	0,50	0,50	0,50

Dapat dilihat dari tabel diatas seluruh perusahaan yang menjadi Sampel penelitian memiliki komisaris independen, untuk perusahaan Pt. Indocement Tunggal Prakasa Tbk tidak memiliki peningkatan jumlah komisaris independen namun tetap dikatakan masuk sebagai fenomena penelitian karena masih memiliki

komisaris independen begitu pula dengan perusahaan lainnya yang menjadi sampel penelitian. Tabel diatas juga menjelaskan bahwa peningkatan komisaris independen akan menyebabkan kinerja perusahaan akan semakin efektif, sehingga perusahaan akan melakukan hal- hal yang dianggap penting agar tercapainya suatu keefektifan dalam kegiatan perusahaan termasuk dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan tarif pajak efektif. Ini berarti bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka memastikan bahwa tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan pemegang saham yaitu melakukan manajemen pajak sehingga hutang pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Hutang pajak yang rendah akan memberikan pengembalian yang lebih tinggi bagi para pemegang saham.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah banyak ditemukan. Salah satunya oleh Minnic dan Noga, (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012), melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Karakteristik *Corporate Governance* sebuah perusahaan tentu saja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, (2011). Karakteristik *Corporate Governance* yang dimaksud adalah :

1. Jumlah dewan komisaris,
2. Persentase komisaris independen,
3. Jumlah kompensasi dewan komisaris dewan direksi, dan
4. Komite audit.

Keempat variabel ini akan dijadikan penentu apakah *Corporate Governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut, Sindi (2014).

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. tugas-tugas utama dewan komisaris yang berhubungan terhadap manajemen pajak meliputi Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil, Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan, memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu, dan Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk persentasidewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Menurut Rebecca, (2012) komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala melakukan *review* atas implementasi strategi tersebut. Dalam tugas dewan komisaris, komisaris independen mendampingi dalam pengambilan keputusan karena komisaris independen senantiasa memberikan masukan secara obyektif dalam pelaksanaan tugas dewan komisaris.

Tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang, dalam penelitiannya mengenai hubungan antara tingkat pajak efektif perusahaan dengan pengukuran kinerja CEO dan manajer, Phillips, (2003) berpendapat bahwa pemberian kompensasi berperan memotivasi kinerja manajer dalam meminimalisasi tingkat pajak efektif perusahaan, Desai dan Dharmapala, (2006) meneliti pengaruh *tax sheltering* dan pemberian kompensasi yang tinggi untuk para manajer. Mereka menemukan bukti yang beda bahwa peningkatan kompensasi untuk manajer cenderung mengurangi tingkat *tax sheltering*. *Tax sheltering* merupakan upaya mengurangi tingkat pendapatan kena pajak sehingga tercapai efisiensi pembayaran pajak.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompensasi memiliki tiga tujuan dasar, yaitu menarik, menahan dan memotivasi *key empolee* (Cheeks, (1982) dalam Sindi,(2014). Kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan. Selain itu kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelolah dan penasehat perusahaan. Dalam hal ini dewan komisaris dan direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Bagi perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan peninghkatan evektifitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi audit internal dan eksternal. Keterbukaan laporan keuangan,keadilan untuk semua *stakholders*, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan manajemen meski ada konflik kepentingan. Indriastuti, (2012)

Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006; dalam Anissa, 2012).

Penelitian ini dilakukan dengan melanjutkan penelitian dari Sindi, (2014) mengenai *Corporate Governance* terhadap manajemen pajak dengan membedakan tahun sampel penelitian yaitu dari tahun 2014-2016. Dari penelitian sebelumnya menarik untuk di teliti kembali dan mengidentifikasi kembali pengaruhnya dalam pengelolaan perusahaan melalui manajemen pajak, dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2014-2016)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
2. Apakah persentase komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
3. Apakah jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak?
5. Apakah jumlah dewan komisaris, komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi, dan komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap manajemen pajak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk mengidentifikasi pengaruh persentase jumlah komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.
4. Untuk mengidentifikasi pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak.
5. Untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah dewan komisaris, komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi, dan komite audit terhadap manajemen pajak secara simultan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Melalui penelitian ini, dapat dijadikan bukti empiris mengenai *corporate governance* terhadap manajemen pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Dapat digunakan sebagai panduan dalam penjabaran pentingnya tugas *corporate governance* dalam ruang lingkup perusahaan
 - b. Sebagai bahan evaluasi untuk penelitian yang sama guna menambah referensi agar di peroleh hasil secara lebih ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang melandasi seluruh permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan hipotesis yang akan diuji pada

BAB III

penelitian ini berdasarkan landasan teori, standar, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan diuraikan bagaimana pembentukan populasi dan sampel penelitian, definisi variabel yang diteliti, metode pengumpulan data, model penelitian, serta prosedur pengolahan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil serta saran bagi peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.